

RENCANA **DIREKTORAT**  
KERJA **JENDERAL**  
(PERUBAHAN) **PLANOLOGI**  
**2020** **KEHUTANAN DAN**  
**TATA LINGKUNGAN**

---

DITJEN PKTL  
KLHK





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P. 14/PKTL/SET.2/KEU.1/12/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.13/PKTL/SETDIT/KEU.  
0/12/2019 TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2020 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
- b. bahwa pada tahun 2020 berjalan, Ditjen PKTL telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,

  
ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI  
NIP. 19720123 200012 1 001

SIGIT HARDWINARTO  
NIP.19610202 198603 1 003

**Lampiran**

**Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

**Nomor : P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2020**

**Tanggal : 18 Desember 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
NOMOR P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019  
TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
TAHUN 2020**





Pengecekan Lokasi Persawahan di Lokasi APL dalam rangka mendukung percepatan PSN Pangan Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah

## PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

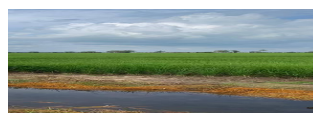
Selain mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga turut berperan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional kedepan.

Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 merupakan merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19; Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*; dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Rencana Kerja (Perubahan) ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja (perubahan) masing-masing serta sebagai penjabaran, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Perubahan) ini bermanfaat untuk mengawal pencapaian sasaran seperti yang diharapkan.

Jakarta,           Desember 2020  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan,



**SIGIT HARDWINARTO**  
NIP. 19610202 198603 1 003

# DAFTAR ISI

<b>BAB 01. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM	3
<b>BAB 02. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 DAN 2019</b>	<b>5</b>
2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 dan Tahun 2019	5
2.2. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2018 dan Tahun 2019	7
<b>BAB 03. RENCANA KERJA TAHUN 2020</b>	<b>11</b>
3.1. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional tahun 2020	11
3.2. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	14
3.3. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020	23
3.4. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Ditjen PKTL Tahun 2020	24
3.5. Perubahan Anggaran Tahun 2020	29
<b>BAB 04. PENUTUP</b>	<b>30</b>
<b>BAB 05. LAMPIRAN</b>	<b>31</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian IKP Program Planologi dan Tata Lingkungan	6
Tabel 2.2. Capaian Sasaran Program Ditjen PKTL tahun 2019	6
Tabel 2.3. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2018	8
Tabel 2.4. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2019	10
Tabel 3.1. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	15
Tabel 3.2. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 per Kegiatan	16
Tabel 3.3. Perubahan Target dan Anggaran Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (Penghematan dalam rangka penanggulangan <i>Covid-19</i> )	17
Tabel 3.4. Penambahan Target dan Anggaran Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 ( <i>ABT Food Estate</i> )	20
Tabel 3.5. Penambahan Target dan Anggaran dalam Rencana Kerja. Ditjen PKTL Tahun 2020 ( <i>ABT PNBPPKH</i> )	22
Tabel 3.6. Target Kinerja Program Ditjen PKTL TA 2020 (Perubahan)	23
Tabel 3.7. Sebaran Kegiatan dan Output Kegiatan Lingkup Ditjen PKTL TA 2020 per Kegiatan	25
Tabel 3.8. Perubahan Pagu Anggaran TA 2020 per Kegiatan	29
Tabel 3.9. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 (Perubahan) berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	32
Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	39
Lampiran 3. Lampiran 3. Perubahan Target Output Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga tahun 2020	47
Lampiran 4. Perubahan Target Output Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH tahun 2020	48
Lampiran 5. Perubahan Target Output Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH tahun 2020	49
Lampiran 6. Perubahan Target Output Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH tahun 2020	50

# 01

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana tema rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 yakni “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, terdapat prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh tugas pokok dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terkait bidang kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan serta membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana, dengan fokus pembangunan pada wilayah dan pengarusutamaan (*main-streaming*) kesetaraan gender, kerentanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan berbasis teknologi digital.

Dukungan terhadap pembangunan nasional tersebut sejalan dengan penyelenggaraan tugas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan nasional serta tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.



## 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

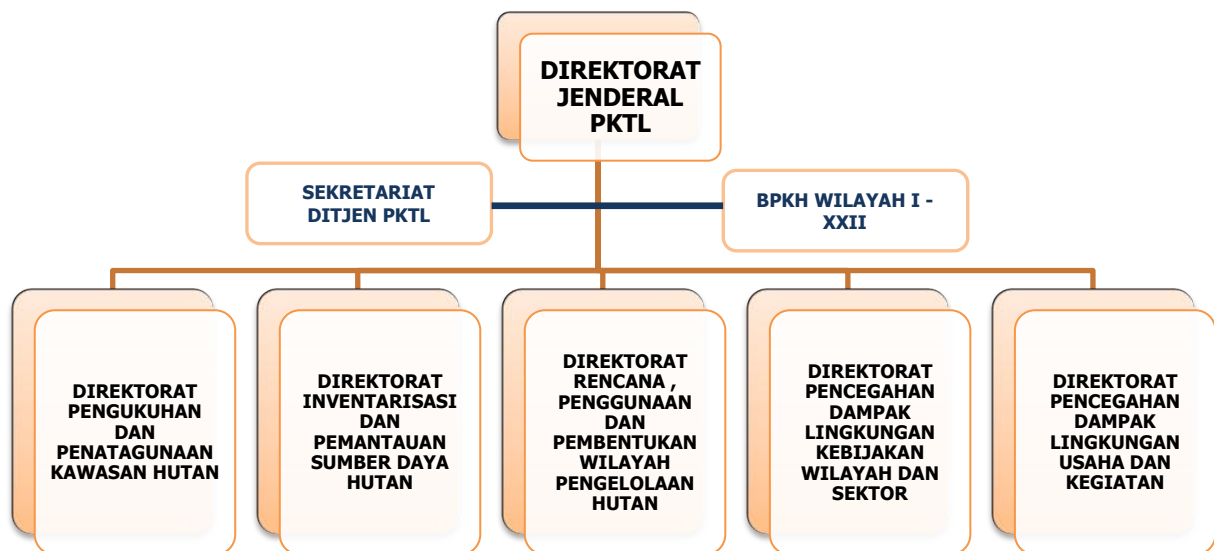
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Adapun tugas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah **menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan**. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan

- wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan
7. Pelaksanaan administrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 1.3. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II di pusat serta 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia.



Gambar 1.1. Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Dalam mewujudkan pelaksanaan target dan kegiatan pada tahun 2020, sampai dengan Oktober 2020 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki modalitas sumber daya manusia 1726 pegawai, yang terdiri dari 1.240 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 486 pegawai kontrak. Dari keseluruhan pegawai ASN, berdasarkan status kepegawaian, saat ini sejumlah 164 orang menjabat sebagai struktural, 267 orang sebagai fungsional tertentu dan 652 orang sebagai fungsional umum. Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dikelompokkan berdasarkan tingkat

pendidikan, pegawai paling banyak berpendidikan Sarjana sebanyak 536 orang (43 persen dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 352 orang (28 persen) dan kelompok pendidikan Magister sebanyak 213 orang (17 persen). Selain itu, mayoritas pegawai didominasi oleh pegawai dengan rentang umur 35-39 tahun (20% dari total pegawai) dan pegawai yang berusia diatas 55 tahun (17 persen dari total pegawai).

Melihat kondisi sebaran sumber daya manusia lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, perekrutan pegawai baru perlu dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.



Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Nanganae Kapenta RTK. 68  
*Sumber : Dokumentasi BPKH Wilayah VIII*



# 02

## CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 DAN 2019

### **2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 dan 2019**

Dalam hal pengukuran kinerja yang merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi., proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program sebagai *outcomes* program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018, dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian IKP Program Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan (Penetapan kawasan hutan 100%)	90%	87,55%	97,27%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	100 KPH	100 KPH	100%
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	100%	100%	100%
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	137,67%	137,67%
<b>Rerata</b>			<b>108,74%</b>	

Jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2018, keberhasilan capaian sasaran program tahun 2019 dapat dihitung melalui indikator kinerja dengan cara penetapan persentase capaian kinerja, efektifitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja antara tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 2.2. Capaian Sasaran Program Ditjen PKTL tahun 2019

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	<b>Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual</b> IKP : Seluruh KH ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	100% (100.737.900 Ha)	88.248.477,82 Ha	87,60
2	<b>Tersedianya Data dan Informasi SDH</b> IKP : Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH	100% (34 Provinsi)	34 Provinsi	100,00
3	<b>Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan</b> IKP : Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air	100% (300 Permohonan)	497 Permohonan	165,97

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	<b>Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung</b> IKP : Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	100% (78 Dokumen)	163 Dokumen	208,97
<b>Rata-rata</b>				<b>140,56</b>

Sumber : LKJ Ditjen PKTL tahun 2019

Dari capaian diatas, terlihat bahwa persentase rata-rata kinerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini menjadi suatu acuan untuk tahun 2020 dan seterusnya dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Diantara keseluruhan sasaran program, terdapat sasaran program "Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual" pada tahun 2019 mengalami penurunan capaian jika dibandingkan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh prioritas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 yang tertuju pada penyelesaian TORA, yang menyebabkan target penetapan kawasan hutan tidak dapat tercapai.

## 2.2. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2018, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2018 sebesar Rp 584.151.090.483,- atau 53,12% dari total pagu. Persentase realisasi penyerapan DIPA Tahun 2018 ini turun drastis apabila dengan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun dengan nominal yang jauh lebih besar.

Realisasi anggaran sebesar Rp 584.151.090.483,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 151.992.392.712,-, belanja barang sebesar Rp 365.366.649.358,- dan belanja modal sebesar Rp 66.792.048.413,-. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal pada kegiatan yang bersumber dana dari HLN dikarenakan pelaksanaan kegiatan tergantung *Annual Work Planning/AWP* dari Bank Dunia. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak detail kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA adalah sebesar 70,5% dari total Pagu Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga berdampak signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Proses pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA merupakan



kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan proses baru bisa berjalan setelah tahapan proses sebelumnya selesai dilaksanakan.

Pada tahun 2018 ini, proses pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA mengalami hambatan pada pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang terdapat pada satker UPT BPKH, yang tentunya berdampak besar pada pelaksanaan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA. Terhambatnya proses tersebut diatas, menyebabkan rendahnya serapan anggaran pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan khususnya terjadi pada output "Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA" dan "Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi". Kedua output pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan ini merupakan tahapan proses yang sebagian baru dapat dijalankan setelah output dari pelaksanaan kegiatan di BPKH berupa inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA telah dilaksanakan.

Tabel 2.3. Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2018

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	68.605.187.000	61.344.414.973	89,42%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	62.582.007.000	36.592.741.257	58,47%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9.691.605.000	9.152.523.838	94,44%
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	46.935.172.000	33.326.911.965	71,01%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3.808.166.000	3.700.715.831	97,18%
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5.416.763.000	5.047.563.435	93,18%
Pemantapan Kawasan Hutan	903.396.084.000	435.343.405.558	48,19%
<b>Total</b>	<b>1.100.434.984.000</b>	<b>584.508.276.857</b>	<b>53,12%</b>

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2019, realisasi penyerapan DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 sebesar Rp 422.599.646.291,- atau 93,64% dari total pagu sebesar Rp. 451.314.101.000,-. Realisasi anggaran

sebesar Rp 422.599.646.291,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 150.834.110.916,-, belanja barang sebesar Rp 267.800.323.718,- dan belanja modal sebesar Rp 3.965.211.657,-. Sementara berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran sebesar Rp. 422.599.646.291,- ini terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 360.364.883.108,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 32.496.796.436,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 29.737.966.747,-.

Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal, diantaranya kegiatan yang bersumber dana dari HLN. Rendahnya persentase penyerapan anggaran yang bersumber dari dana HLN disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Pengadaan jasa konsultasi melalui mekanisme *World Bank* sudah dilakukan 2 (dua) kali pengadaan dan tidak dapat dilanjutkan, karena keterbatasan waktu yang dibutuhkan dengan prosedur *World Bank* tidak sesuai.
- Adanya kelebihan anggaran yang bersumber dari *World Bank* sebesar Rp.6.207.600.000 (sisa mati) untuk pembayaran jasa konsultan *Supporting Unit* (SU) di 10 (sepuluh) KPH, dikarenakan 3 (tiga) bulan pertama telah dibayarkan menggunakan alokasi dana Danida yang bersifat lunturn dan berakhir tanggal 30 Juni 2019.
- Adanya sebagian anggaran untuk pembayaran 3 bulan *Consultant Services (A Consortium of FCG International Ltd (Finland) in Association with FGA Consulting Group GmbH (Germany))* yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan penundaan secara formal kegiatan yang melibatkan FCG International Ltd per 1 Agustus 2019 sebagaimana surat Direktur RPP ke FCG International Ltd Nomor S.1048/REN/PWAP/ PLA.0/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- Beberapa kegiatan operasional PMU dan PCU tidak dapat terlaksana karena penundaan kegiatan FCG terhitung 1 Agustus 2019.
- Adanya kegiatan Expose Pencapaian Penyelenggaraan FIP II yang telah direncanakan pada AWP 2019 tetapi tidak mendapatkan NoL dari pihak *World Bank*.
- Kegiatan FGD yang bersumber dari dana Danida yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu (akhir Penggunaan dana Danida 30 Juni 2019).

Tabel 2.4 Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2019

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	61.951.150.000	60.541.811.005	97,73%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.984.349.000	10.838.344.671	90,44%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.630.325.000	4.522.982.549	97,68%
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	49.242.011.000	38.597.495.616	78,38%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.748.694.000	5.683.278.186	98,86%
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998.000	4.203.303.856	96,86%
Pemantapan Kawasan Hutan	313.392.574.000	298.212.430.408	95,16%
<b>Total</b>	<b>455.424.386.000</b>	<b>370.912.756.209</b>	<b>93,64%</b>

Sumber : LKJ Ditjen PKTL tahun 2019



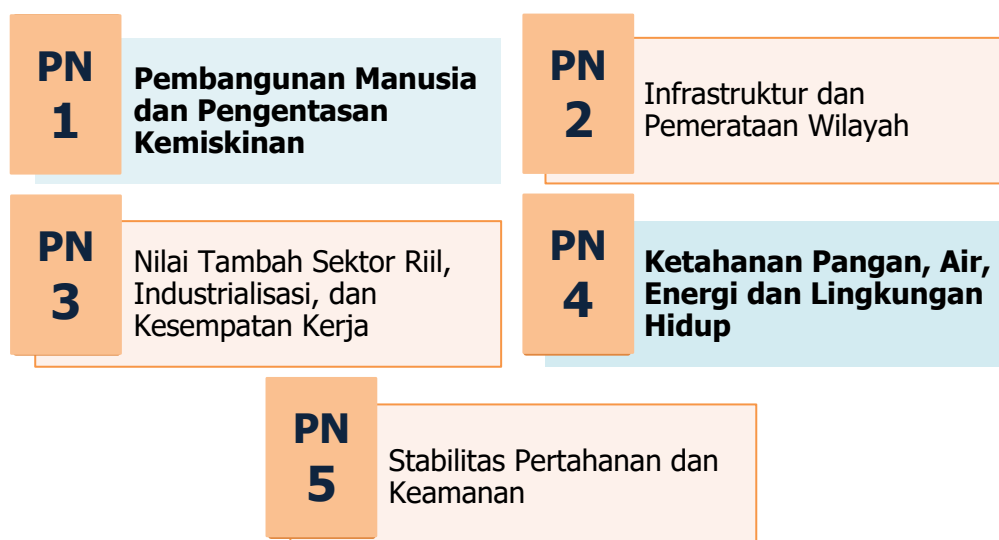
Pemasangan Plat Seng dalam rangka kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan  
Sumber : BPKH Wilayah XIII

# 03

## RENCANA KERJA TAHUN 2020

### 3.1. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020

Tahun 2020, merupakan tahun peralihan dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan penjabaran pertama dari RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun tujuan pada RPJMN tersebut, antara lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan berfokus pada pembangunan manusia; ekonomi; kewilayahan; infrastruktur; politik, hukum, pertanahan dan keamanan. Dengan tema "***Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas***", Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, berprioritas pada 5 (lima) pembangunan nasional, dimana Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.



Gambar 3.1. Prioritas Nasional pada RKP 2020



Sesuai dengan RKP Tahun 2020, arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan yang dimulai dengan memberikan kejelasan status hukum (legal) sebuah kawasan hutan sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Keputusan MK No. 45/2011, meningkatkan kualitas dan akses/keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak diantaranya melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat unit pengelola (KPH) serta memastikan pembagian peran regulator dan pelaksana (operator) dalam pengelolaan kawasan hutan. Terkait tata lingkungan, arah kebijakan tahun 2020 adalah memastikan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dimana keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 akan menjadi pembuka jalan bagi pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN tahun 2020-2024.

## **PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

Beberapa kebijakan strategis dalam mewujudkan prioritas nasional ini antara lain :

- Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,
- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk,
- Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan, dan
- Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Adapun sasaran prioritas nasional ini antara lain meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat dan meningkat dan meratanya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut mendukung program prioritas pengentasan kemiskinan melalui kegiatan prioritas Reforma Agraria dan perhutanan sosial dengan sasaran meningkatkan penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi, dengan mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Salah satu indikator untuk mewujudkan sasaran tersebut yakni luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

## PN 4. KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN

Adapun kebijakan strategis dalam mewujudkan prioritas nasional ini antara lain:

- Meningkatkan Energi Baru Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi.
- Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut mendukung program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air serta kegiatan prioritas penataan hutan dengan daya dukung tinggi dengan sasaran tercapainya penataan kawasan hutan dengan daya dukung daya tampung tinggi. Indikator tercapainya kegiatan ini adalah terpetakannya kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi seluas 62 juta ha. Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional - prioritas nasional tersebut, maka Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menyesuaikan keluaran (output) dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan hasil *Bilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* antara Kementerian LHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan.



Gambar 3.2. Dukungan Prioritas Nasional Tahun 2020

### 3.2. PERUBAHAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2020

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka untuk mencapai sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, ditetapkan 6 (enam) kegiatan dengan output dan target pada masing-masing kegiatan. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 480.427.464.000,- dimana 33,34% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 10,06% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 56,60% pada masing-masing satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020 maupun prioritas bidang (Reguler).

Komposisi dan sebaran alokasi pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.1. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

(Rp. x 1.000)

Sumber Dana	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Jumlah	%
a RM (Rupiah Murni)	160.181.360	48.334.861	213.417.011	421.933.232	<b>87,82%</b>
b PNPB	-	-	38.394.232	38.394.232	<b>7,99%</b>
c HLN (Hibah Luar Negeri)	-	-	20.100.000	20.100.000	<b>4,18%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>160.181.360</b>	<b>48.334.861</b>	<b>271.911.243</b>	<b>480.427.464</b>	-
<b>%</b>	<b>33,34%</b>	<b>10,06%</b>	<b>56,60%</b>	-	

Tabel 3.2. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 per Kegiatan

(Rp. x 1.000)

Kegiatan	Anggaran	Persentase
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	145.736.857	30,33%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	25.195.310	5,24%
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	46.063.689	9,59%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.717.807	1,19%
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.535.000	0,94%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PKTL	253.178.801	52,70%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>480.427.464</b>	-

Pada tahun 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2020, terkait:

- a. Penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19*;
  - b. Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*; dan
  - c. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan,
- yang mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

#### **A. PENGHEMATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN *COVID-19***

Dalam rangka penanganan penanggulangan *Covid-19*, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan No.S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 serta porsi penghematan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dengan nilai penghematan sebesar Rp. 130.420.000.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan redistribusi sumber anggaran PNBP sebesar Rp 38.394.232.000,-. Adapun kebijakan penghematan anggaran DIPA Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2020 dan redistribusi sumber anggaran PNBP dilaksanakan dengan beberapa ketentuan:

- a) Penghematan anggaran Rupiah Murni (RM) yang dapat bersumber dari:
  - Sisa anggaran Belanja Barang Non Operasional, baik kegiatan Prioritas Nasional maupun kegiatan Non Prioritas Nasional.
  - Anggaran dan/atau sisa anggaran Belanja Modal.
- b) Pencapaian volume output kegiatan yang wajib dipertahankan:
  - Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, baik yang bersumber dari RM maupun PNP.
  - 50% target volume kegiatan Data dan Informasi SDH Inventarisasi Hutan Nasional.
  - Kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.



- c) Tambahan pagu anggaran PNBP hanya dapat digunakan untuk kegiatan Prioritas Nasional yang terkena pemotongan anggaran Rupiah Murni, khususnya untuk kegiatan sebagai berikut:
- Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan;
  - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA.
  - Penataan Batas Kawasan Hutan Reguler.
  - Penuntasan kegiatan Prioritas Nasional lainnya yang sebagian elemen kegiatannya telah berjalan (dalam rangka memastikan dihasilkannya sebuah output kegiatan)
  - Kegiatan lainnya dalam rangka mendukung pematapan kawasan hutan.

Dalam hal ini, revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian pagu belanja K/L yang berasal dari Rupiah Murni dan pergeseran anggaran sumber dana PNBP dalam satu program. Perubahan tersebut mengakibatkan penurunan volume target Prioritas Nasional (PN) maupun Prioritas Bidang. Adapun perubahan yang terjadi pada target prioritas Nasional pada pagu anggaran Ditjen PKTL tahun 2020 setelah mengalami penghematan, antara lain :



Kegiatan Pengukuran Tinggi Pohon  
Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan KH

Tabel 3.3. Perubahan Target dan Anggaran Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (Penghematan dalam rangka penanggulangan Covid-19)

No	Output	Semula		Menjadi		Selisih
		Target	Anggaran (Ribuan Rupiah)	Target	Anggaran (Ribuan Rupiah)	Anggaran (Ribuan Rupiah)
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan	16.432.343	1-Layanan	8.906.395	7.525.948
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1-Layanan	7.953.634	1-Layanan	5.095.155	2.858.479
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1-Layanan	20.276.657	1-Layanan	17.826.145	2.450.512
4	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5-Juta Hektar	1.744.370	0,5-Juta Hektar	1.007.185	737.185
5	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1-Judul	270.000	1-Judul	304.070	(34.070)
6	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan HakHak Pihak Ketiga	4.778-Km	57.479.479	2.462-Km	24.067.984	33.411.495
7	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	48-Pemohon	561.470	40-Pemohon	445.300	116.170
8	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	3-Dokumen	3.080.833	3-Dokumen	1.883.504	1.197.329
9	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	130000-Hektar	2.077.610	46.500-Hektar	603.470	1.474.140
10	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	13-Provinsi	80.523.095	20-Dokumen	26.260.941	54.262.154
11	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	11-Dokumen	4.870.508	1-Dokumen	2.662.557	2.207.951
12	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	182-Klaster	13.652.323	126-Klaster	8.260.514	5.391.809
13	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22-Dokumen	6.672.479	18-Dokumen	2.885.732	3.786.747
14	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530-Peta	450.000	530-Peta	335.205	114.795



No	Output	Semula		Menjadi		Selisih
		Target	Anggaran (Ribu Rupiah)	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)	Anggaran (Ribu Rupiah)
15	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN	10-Dokumen	2.779.270	11-Dokumen	1.758.806	1.020.464
16	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	1-Dokumen	1.670.000	300-Dokumen	1.090.530	579.470
17	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	19-Laporan	6.649.172	22-Laporan	5.773.831	875.341
18	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1-Dokumen	917.950	1-Dokumen	572.860	345.090
19	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	22-KPH	13.497.297	15-KPH	6.397.198	7.100.099
20	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	30 KLHS	600.000	17 KLHS	336.000	264.000
21	RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	6-Dokumen	2.770.000	1-Dokumen	1.550.636	1.219.364
22	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	65-Juta Ha	1.500.000	65-Juta Ha	840.000	660.000
23	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	7-Dokumen	847.807	0	-	847.807
24	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	60-Dokumen	3.785.000	45-Dokumen	2.106.399	1.678.601
25	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada Provinsi	5-Provinsi	750.000	3-Provinsi	420.850	329.150
<b>Total</b>		-	<b>251.811.297</b>	-	<b>121.391.267</b>	<b>130.420.030</b>

## **B. PENAMBAHAN ANGGARAN DUKUNGAN KETAHANAN PANGAN TERPADU *FOOD ESTATE***

Melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.495/MENLHK/SETJEN/REN.0/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 perihal PSN Pangan Terpadu *FOOD ESTATE*, program utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung percepatan PSN Pangan Terpadu dalam kerangka Pengembangan *Food Estate* Terpadu dengan prinsip Keberlanjutan (lingkungan hidup tetap terjaga dan lestari), antara lain meliputi :

- 1) Penyediaan Kawasan untuk pangan yang bebas dari masalah status hutan negara serta siap dibangun;
- 2) Kawasan pangan yang tidak ada masalah fragmentasi habitat satwa;
- 3) Penyediaan wilayah lahan pangan yang telah pulih dari kerusakan gambut dan bebas dari resiko masalah gambut;
- 4) Wilayah yang menjadi sasaran pada tahun 2020, antara lain propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Papua, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara;
- 5) Menjamin *Governance* Pembangunan Kawasan Pangan terpadu yang berkelanjutan, partisipatif dan transparan serta koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Lampiran I Surat Menteri Keuangan Nomor S-223/MK.2/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian LHK (BA 029) untuk Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) dan Penanaman Mangrove, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disetujui untuk memperoleh tambahan pagu anggaran sebesar Rp 80.081.687.000 pada DIPA Tahun anggaran 2020. Tambahan tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan terkait penyiapan lahan pangan terpadu Food Estate di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua, meliputi kegiatan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyiapan Lahan Pangan Food Estate di 4 Provinsi; pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat di 4 Provinsi; serta pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal Lahan Pangan di 4 Provinsi.

Menindaklanjuti surat menteri diatas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengajukan revisi anggaran melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S-681/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran dengan tema penambahan pagu anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*.



Adapun usulan penambahan anggaran dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu Food Estate pada tahun 2020 tersebut telah disetujui dan disahkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan sebesar Rp.80.081.867.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 menjadi Rp.430.089.331.000,-.

Tabel 3.4. Penambahan Target dan Anggaran Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (ABT *Food Estate*)

No	Satker/Output	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
<b>1</b>	<b>Kantor Pusat Ditjen PKTL</b>		<b>31.714.377.000</b>
a	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	4 Pemohon	24.640.977.000
b	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	4 KLHS	3.000.000.000
c	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	4 Dokumen	4.073.400.000
<b>2</b>	<b>BPKH Wilayah I Medan</b>		<b>5.032.357.000</b>
a	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	356 Km	5.032.357.000
<b>3</b>	<b>BPKH Wilayah II Palembang</b>		<b>3.937.487.000</b>
a	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	300 Km	3.937.487.000
<b>4</b>	<b>BPKH Wilayah X Jayapura</b>		<b>28.989.698.000</b>
a	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	2.880 Km	28.989.698.000
<b>5</b>	<b>BPKH Wilayah XXI Palangkaraya</b>		<b>10.407.948.000</b>
a	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	876 km	10.407.948.000
<b>TOTAL</b>			<b>80.081.867.000</b>

### **C. PENAMBAHAN ANGGARAN PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)**

Sehubungan dengan kegiatan penggunaan kawasan hutan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.167/MENLHK/PKTL/PLA.0/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 Hal Usulan Permohonan Penggunaan Sebagian pendapatan PNB-PKH, mengajukan permohonan penggunaan sebagian pendapatan PNB-PKH kepada Menteri Keuangan mulai tahun 2019. Adapun penggunaan dana tersebut ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan mendesak tahun anggaran 2019 tanpa mengurangi pagu anggaran yang sudah ada sebesar 10% dari target PNB-PKH tahun 2019 dan untuk tahun-tahun selanjutnya mulai tahun anggaran 2020 sebesar 30% dari target PNB-PKH setiap tahunnya.

Atas surat tersebut diatas, Menteri Keuangan memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Keuangan S-573/MK.02/2020 tanggal 6 Juli 2020 Hal Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ketentuan :

1. Penggunaan sebagian Dana PNB-PKH dapat disetujui dengan besaran paling tinggi 11,98% (sebelas koma Sembilan puluh delapan persen) atau senilai Rp. 120.676.453.689,-;
2. Persetujuan penggunaan berlaku dari tahun 2020 s.d. 2022 dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan/atau optimalisasi PNB-P.
3. Penggunaan sebagian dana PNB-PKH dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Perencanaan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
  - b. Inventarisasi dan Peantauan Sumberdaya Hutan
  - c. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
  - d. Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan
  - e. Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan
  - f. Kegiatan pendukung pemantapan Kawasan hutan lainnya.

Oleh karena itu, sebagaimana surat Menteri Keuangan diatas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.737/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran, menyampaikan usulan penambahan pagu anggaran penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Sebagian dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang tidak tertampung dalam pembiayaan dengan

sumber dana anggaran Rupiah Murni (RM) atau yang tertampung namun belum mencukupi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Revisi Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, usulan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari dana PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) telah disahkan dengan dana sebesar Rp.16.971.505.000,-. Dengan pengesahan tersebut, pagu Ditjen Planologi kehutanan dan tata Lingkungan yang semula sebesar Rp. 430.089.331.000,- berubah menjadi sebesar Rp.447.060.836.000,-

Tabel 3.5. Penambahan Target dan Anggaran dalam Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (ABT PNPB-PKH)

No	Kegiatan/Output	Target	Anggaran (ribu rupiah)
<b>1</b>	<b>PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN</b>		<b>1.715.788</b>
a	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga (pelaksanaan Tata Batas HPK Non Produktif)	264 km	1.353.398
b	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH (Orientasi Batas KH)	187 km	362.390
<b>2</b>	<b>INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>		<b>5.645.459</b>
a	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan dan Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional)	1 Dokumen	804.334
b	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	78 Klaster	4.870.309
<b>3</b>	<b>PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN</b>		<b>4.247.632</b>
a	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP (Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP)	530-Peta	357.050
b	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	11-Dokumen	989.768
c	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	300-Dokumen	746.464
d	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	45 Lokasi	2.154.350

No	Kegiatan/Output	Target	Anggaran (ribu rupiah)
<b>4</b>	<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR</b>		<b>261.123</b>
a	RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah (kegiatan penyusunan peta ekoregion dan penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan instrumen ekonomi LH)	1-Dokumen	261.123
<b>5</b>	<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN</b>		<b>267.297</b>
a	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL; Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan; dan Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah)		267.297
<b>6</b>	<b>Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Kawasan Hutan dan dukungan manajemen satker dan tugas teknis Ditjen PKTL</b>		<b>4.834.206</b>
<b>TOTAL</b>			<b>16.971.505</b>

### 3.3. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Program Planologi dan Tata Lingkungan ditetapkan dengan sasaran dan indikator program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2020, penyesuaian terhadap Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dan perubahan anggaran DIPA tahun 2020.

Tabel 3.6. Target Kinerja Program Ditjen PKTL Tahun 2020 (Perubahan)

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk Kawasan konservasi)	0,5 Juta hektar
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar	34 Provinsi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		penyusunan kebijakan dan rencana kelola	
	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	46.500 Hektar
	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	34 Provinsi
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	17 KLHS
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	3 Laporan
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	79 Poin

### 3.4. KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN DITJEN PKTL TA 2020

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan 6 (enam) kegiatan dengan output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.7. Sebaran Kegiatan dan Output Kegiatan lingkup Ditjen PKTL TA 2020

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Indikator Output Kegiatan	Target
<b>Kegiatan: 5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>			
Sasaran Kegiatan: 01 - Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)		0,5-Juta Hektar
	001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	Seluruh kawasan hutan selesai ditetapkan (Tahun 2024 sebesar 100% kawasan hutan)	0,5-Juta Hektar
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		1-Judul
	004-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi, dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1-Judul
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga		7.140-Km
	007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Panjang tata batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	7.140-Km
Sasaran Kegiatan: 02 - Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH		3-Dokumen
	008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Pengendalian pemantapan kawasan hutan terlaksana	3-Dokumen
Sasaran Kegiatan: 03 - Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		44-Pemohon
	005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Dokumen Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	44-Pemohon
Sasaran Kegiatan: 03 - Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		46.500-Hektar
	002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	46.500-Hektar

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Indikator Output Kegiatan	Target
	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH		20-Dokumen
	006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	20-Dokumen
<b>Kegiatan: 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>			
Sasaran Kegiatan: 01 - Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan		1-Dokumen
	001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1-Dokumen
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH		205-Klaster
	004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	205-Klaster
	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH		18-Dokumen
	005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	18-Dokumen
<b>Kegiatan: 5435 - Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>			
Sasaran Kegiatan: 01 - Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP		530-Peta
	002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP tersedia	530-Peta
	007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Terwujudnya penguatan kelembagaan untuk pengelolaan SDA berbasis masyarakat	1-Laporan

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Indikator Output Kegiatan	Target
Sasaran Kegiatan: 02 - Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030		11-Dokumen
	004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	11-Dokumen
Sasaran Kegiatan: 03 - Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		300-Dokumen
	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang dilayani dan diselesaikan	300-Dokumen
	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH		94 - Laporan
Sasaran Kegiatan : 06 - Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	94 - Laporan
	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa		1-Dokumen
Sasaran Kegiatan : 07 - Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1-Dokumen
	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		15-KPH
Sasaran Kegiatan : 07 - Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Jumlah rancangan rencana pengelolaan KPH	15-KPH
	<b>Kegiatan: 5436 - Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b>		
Sasaran Kegiatan: 01 - Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya		21-KLHS
	002- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung terjaminnya kualitas	21-KLHS
Sasaran Kegiatan: 02 - Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah		1-Dokumen
	004- RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1-Dokumen

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Indikator Output Kegiatan	Target
Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air		65-Juta Ha
	010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	65-Juta Ha
<b>Kegiatan: 5437 - Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>			
Sasaran Kegiatan: 01 - Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		49-Dokumen
	001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dari Sektor Prioritas	49-Dokumen
Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi		3-Provinsi
	006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada 5 Provinsi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	3-Provinsi
<b>Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>			
Sasaran Kegiatan: 01 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal		79-Poin
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Terlayannya Dukungan Manajemen Eselon I	1-Layanan
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Terlayannya Kebutuhan Sarana Prasarana Internal	1-Layanan
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayannya Dukungan Manajemen Satker	1-Layanan
	994-Layanan Perkantoran	Terlayannya Kebutuhan Kantor berupa Pembayaran Gaji beserta Tunjangannya dan Operasional Pimpinan dan Kantor	23-Layanan

### 3.5 Perubahan Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020, setelah mengalami penghematan dan penambahan anggaran, pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berubah menjadi sebesar Rp.447.060.836.000,- dimana 83% berasal dari sumber dana Rupiah Murni dan 12% berasal dari sumber dana PNBP.

Tabel 3.8. Perubahan Pagu Anggaran TA 2020 per Kegiatan

(Rp. x 1.000)

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	(-) PENGHEMATAN	(+)ABT <i>FOOD ESTATE</i>	(+) ABT PNBP-PKH
1	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	145.736.857	54.572.454	127.581.165	129.296.709
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	25.195.310	13.808.803	13.846.119	19.454.262
3	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	46.063.689	36.028.460	36.057.400	40.276.092
4	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.717.807	2.726.636	5.726.636	5.987.759
5	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.535.000	2.527.249	6.600.649	6.867.946
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PKTL	253.178.801	240.343.862	240.277.362	245.178.068
<b>TOTAL</b>		<b>480.427.464</b>	<b>350.007.464</b>	<b>430.089.331</b>	<b>447.060.836</b>

Tabel 3.9. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 (Perubahan) berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

(Rp. x 1.000)

Sumber Dana	Belanja Operasional			Belanja Non Operasional			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	total	Belanja Barang	Belanja Modal	total	
Rupiah Murni (RM)	158.463.549	49.249.545	<b>207.713.094</b>	134.020.432	29.861.573	<b>163.882.005</b>	<b>371.595.099</b>
PNBP	-	-	-	48.266.933	7.098.804	<b>55.365.737</b>	<b>55.365.737</b>
HLN	-	-	-	20.100.000	-	<b>20.100.000</b>	<b>20.100.000</b>
Jumlah	158.463.549	49.249.545	<b>207.713.094</b>	202.387.365	36.960.377	<b>239.347.742</b>	<b>447.060.836</b>



# 04

## PENUTUP

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan perubahan terhadap anggaran DIPA tahun 2020 antara lain terkait penghematan dalam rangka penanggulangan pandemi *Covid-19*; penambahan Pagu Anggaran dalam rangka dukungan Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan *Food Estate*; dan penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, yang mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dengan mengakomodir perubahan-perubahan dimaksud.

Rencana Kerja (Perubahan) ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja (perubahan) masing-masing serta sebagai penjabaran, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020.

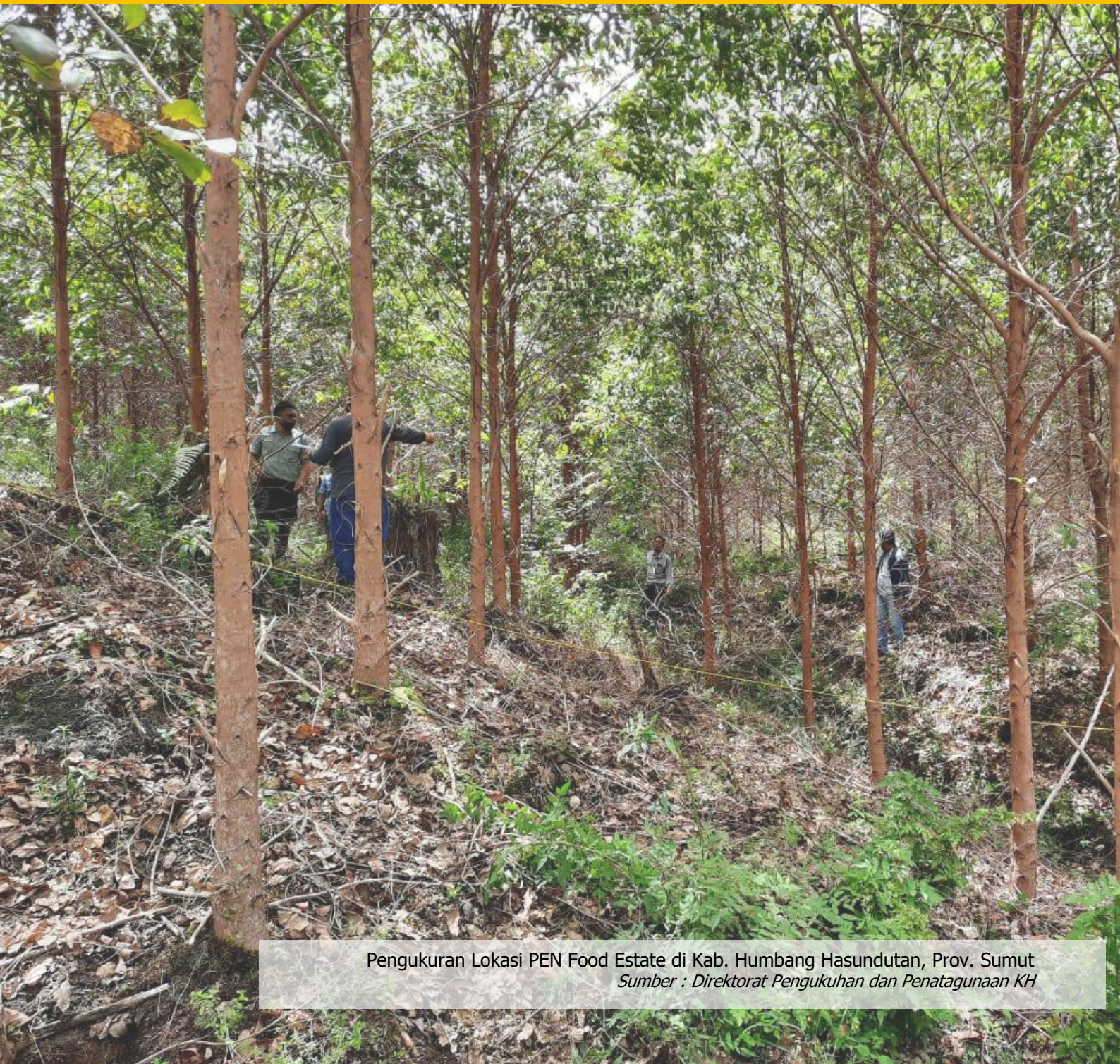
Adapun seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2020 berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja (perubahan) ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi dan pemanfaatan investasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2020, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja (Perubahan) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan DIPA TA. 2020 dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Revisi) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020.



05

## LAMPIRAN



Pengukuran Lokasi PEN Food Estate di Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumut  
Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan KH



Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>			<b>253.178.801</b>									
<i>Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</i>	<i>01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024</i>											
<b>950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>		<b>1-Layanan</b>	<b>16.432.343</b>									
001-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Sekretariat Ditjen			14.803.109									
051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran		4-Dokumen/Layanan										
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		6-Dokumen/Layanan										
053-Pengelolaan data dan informasi		3-Dokumen/Layanan										
054-Pengelolaan keuangan		4-Dokumen/Layanan										
056-Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		10-Dokumen/Layanan										
057-Pengelolaan kepegawaian		2-Dokumen/Layanan			Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
058-Pelayanan umum dan perlengkapan		4-Dokumen/Layanan										
061-Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		1-Dokumen/Layanan										
002-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis			1.629.234									
051-Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH		4-Dokumen/Layanan										
052-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH		6-Dokumen/Layanan										
053-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH		3-Dokumen/Layanan										
054-Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK		4-Dokumen/Layanan										
055-Dukungan Manajemen Direktorat PDLKWS		10-Dokumen/Layanan										
<b>951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		<b>1-Layanan</b>	<b>7.953.634</b>									
001-Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat			386.100									
052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		10-unit										
002-Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker BPKH			7.567.534									
052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		9-unit			Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		7-unit										
054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	6-unit											
<b>970-Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>1-Layanan</b>	<b>20.276.657</b>										
Tanpa Sub Out Put												
051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	22-Dokumen			BPKH	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak	
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	22-Dokumen											
053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	22-Dokumen											
054-Pengelolaan kepegawaian	22-Dokumen											

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		22-Dokumen									
<b>994-Layanan Perkantoran</b>		1-Layanan	<b>208.516.167</b>								
001- Layanan Perkantoran Satker Pusat			62.392.095								
001-Gaji dan Tunjangan		1-Layanan									
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan									
002- Layanan Perkantoran Satker BPKH			146.124.072	PUSAT/BPKH	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
001-Gaji dan Tunjangan		22-layanan									
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		22-Layanan									
<b>PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN</b>			<b>145.736.857</b>								
<i>Kawasan hutan yang ditetapkan</i>	<i>01-Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan</i>										
001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan		5-Juta Hektar	<b>1.744.370</b>								
Tanpa Sub Output											
051-Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah I		2,5 Juta Hektar									
052-Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah II		2,5 Juta Hektar									
053-Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I		1-Laporan		Pusat	KP 4 : Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	PP 4 : Pengentasan Kemiskinan	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	-	-	004 - Mitigasi perubahan iklim	Tidak
054-Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah II		1-laporan									
055-Pengendalian substansi perkembangan pengukuhan kawasan hutan		34-Provinsi									
056-Pelayanan tata batas unit pengelolaan		100-Pemohon									
004-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		1-Judul	<b>270.000</b>								
Tanpa Sub Output											
051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		34-Provinsi		Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Tidak
052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		34-Provinsi									
007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga		4.778-Km	<b>57.479.479</b>								
Tanpa Sub Output											
051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)		4.778-Km		BPKH	KP 4 : Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	PP 4 : Pengentasan Kemiskinan	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim	Tidak
<i>Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku</i>	<i>02-Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan</i>										
005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		48-Pemohon	<b>561.470</b>	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Ya
Tanpa Sub Output											
051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		48-Pemohon									
052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan		1-Laporan									
053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		1-Dokumen									

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
054-Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	<i>03-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA</i>	1-Dokumen										
<b>008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>		3-Dokumen	<b>3.080.833</b>	BPKH	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Tidak	
Tanpa Sub Output												
051-Pengendalian pemantapan kawasan hutan		3-BPKH										
<b>Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untu penyediaan sumber TORA</b>												
<b>002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA</b>		130000-Hektar	<b>2.077.610</b>									
Tanpa Sub Output												
051-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		130000-Hektar		Pusat	KP 4 : Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	PP 4 : Pengentasan Kemiskinan	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan				Bukan Tematik	Tidak
052-Pemutakhiran data dan peta TORA		26-Provinsi										
053-Sosialisasi Data dan Peta TORA yang muktahir												
<b>006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>		13-Provinsi	<b>80.523.095</b>									
Tanpa Sub Output												
051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan		13-Provinsi		BPKH	KP 4 : Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	PP 4 : Pengentasan Kemiskinan	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan				Bukan Tematik	Tidak
052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		1.245-Km										
053-Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH		11-BPKH										
<b>INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>			<b>25.195.310</b>									
<i>Data dan Peta SDH Nasional</i>	<i>01-Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH</i>											
<b>001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan</b>		11-Dokumen	<b>4.870.508</b>									
Tanpa Sub Out Put												
051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan		1-Dokumen										
052-Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan		1-Dokumen			Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
053-Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan		4-Judul										
054-Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		4-Judul										
055-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional		34-Provinsi										
<b>004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH</b>		182-Klaster	<b>13.652.323</b>									
Tanpa Sub Out Put												
051-Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	182-Klaster			BPKH	KP 1. Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender	Tidak	
052-Manajemen Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	8-Laporan											



Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH		22-Dokumen	6.672.479	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Out Put											
005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH		22-Dokumen									
<b>PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>46.063.689</b>								
<i>Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH</i>	<i>01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH</i>										
002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP		530-Peta	450.000	Pusat	KP 1 : Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Eenergi dan Lingkungan Hidup	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Out Put											
051-Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP		530-Peta									
007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project		1-Laporan	20.100.000	Pusat	KP 1 : Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Eenergi dan Lingkungan Hidup	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Out Put											
051-Forest Investment Program-Project 2 (FIP)		1-Laporan									
<i>Jumlah provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun</i>	<i>02-Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi</i>										
<i>Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN dan RKTP</i>											
<i>Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH</i>											
<i>Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah</i>											
004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030		10-Dokumen	2.779.270	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Out Put											
051-Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan		2-Dokumen									
052-Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP		3-Dokumen									
053-Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1-Sistem									
054-Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH		34-Provinsi									
055-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH		1-Dokumen									
056-Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan		1-Dokumen									
057-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi		1-Dokumen									

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
<i>Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnnya sesuai peraturan yang berlaku</i>	<i>03-Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi</i>																		
<b>001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan</b>		<b>1-Dokumen</b>	<b>1.670.000</b>	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim	Tidak							
Tanpa Sub Out Put																			
051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan		300-Pemohon																	
052-Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%		1-Dokumen																	
<b>013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>		<b>19-Laporan</b>	<b>6.649.172</b>	BPKH	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak							
Tanpa Sub Out Put																			
051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	19-Laporan																		
<b>Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</b>	<i>06-Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</i>																		
<b>011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</b>		<b>1-Dokumen</b>	<b>917.950</b>	Pusat	KP 4 : Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	PP 4 : Pengentasan Kemiskinan	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak							
Tanpa Sub Output																			
051-Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1-Dokumen																		
<b>Jumlah KPH yang memiliki Kemampuan Rencana Kelola</b>	<i>07-Terfasilitasinya penyusunan Rencana Kelola KPH</i>																		
<b>012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>		<b>22-KPH</b>	<b>13.497.297</b>	BPKH	KP 1 : Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak							
Tanpa Sub Output																			
051-Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		22-KPH																	
052-Manajemen Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	5-Laporan																		
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR</b>			<b>5.717.807</b>																
<i>Terjaminnya Kualitas Review KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah</i>	<i>02-Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM dan KRP Prioritas di tingkat Nasional dan Daerah</i>																		
<i>Tereviewnya Kelayakan Dokumen KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah</i>																			
<b>002- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya</b>		<b>30 KLHS</b>	<b>600.000</b>	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak							
Tanpa Sub Out Put																			
051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30 KLHS																		
<b>Penerapan RPPLH yang termonev dan disempurnakan</b>	<i>03-Terlaksananya Penerapan RPPLH pada Dokumen Perencanaan di Pusat dan Daerah</i>																		
<b>004- RPPLH Nasional yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah</b>		<b>6-Dokumen</b>	<b>2.770.000</b>	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak							
Tanpa Sub Out Put																			
051-Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah	1-Dokumen																		
052-Penetapan D3TLH Nasional	2-Dokumen																		

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
053-Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000		9-Wilayah Ekoregion									
054-Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia		2-Dokumen									
<b>Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi</b>	<b>06-Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi</b>										
010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air		65-Juta Ha	1.500.000	Pusat	KP 1 : Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Out Put		65-Juta Ha									
051-Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air		7-Dokumen	847.807	Pusat	KP 1 : Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	-	-	Bukan Tematik	Tidak
011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH		7-Dokumen									
Tanpa Sub Out Put	7-Dokumen										
051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif											
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN</b>			<b>4.535.000</b>								
<i>Jumlah permohonan penilaian dan pemeriksaan sektor prioritas yang menjadi kevenangan KPA Pusat dan KLHK terlayani 100% sesuai dengan NSPK</i>	<i>Terselenggaranya sistem Kajian Dampak Lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan</i>										
<i>Jumlah NSPK di Bidang Kajian Dampak Lingkungan yang diterbitkan dan Jumlah Instansi Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang Kajian Dampak Lingkungan</i>											
<i>Implementasi sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan yang mendukung sistem Kajian Dampak Lingkungan</i>											
<i>Jumlah penilaian audit lingkungan hidup dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan</i>											
<i>Jumlah KPA dan pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah) yang melakukan penilaian dan pemeriksaan serta penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK</i>											
<b>001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</b>		60-Dokumen	3.785.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	-	Bukan Tematik
Tanpa Sub Out Put											
051-Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL		40-Dokumen									
052-Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL ) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan ( IL)		20-Formulir									
053-Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		3-Dokumen									
054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan		240-Instansi									

Kegiatan /IKK/ Output/Sub Output/ Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Ribu/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
055-Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan		1-Laporan									
056-Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah		1-Laporan									
057-Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan		1-Laporan									
058-Penilaian audit lingkungan hidup		15-Dokumen									
059-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)		12-Dokumen									
060-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan		12-Dokumen									
061-Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah)		68-KPA									
062-Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP		150-Dokumen									
<i>Tersedianya Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi pada 7 Provinsi</i>											
006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada 5 Provinsi		5-Provinsi	750.000								
Tanpa Sub Out Put				BPKH	KP 1 : Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Eenergi dan Lingkungan Hidup	-	-	Bukan Tematik	Tidak
051-Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi		5-Provinsi									
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>480.427.464</b>								

Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNBPK-PKH		Lokasi	
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>			<b>253.178.801</b>		<b>240.343.862</b>		<b>240.343.862</b>		<b>245.178.068</b>		
<i>Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</i>										
<i>950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>											
<b>001-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Sekretariat Ditjen</b>		<i>1-Layanan</i>	<b>16.432.343</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>8.906.395</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>8.146.020</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>8.146.020</b>		
051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran			<b>14.803.109</b>		<b>7.706.112</b>		<b>6.945.737</b>		<b>6.945.737</b>		
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan			
053-Pengelolaan data dan informasi		6-Dokumen/Layanan		6-Dokumen/Layanan		6-Dokumen/Layanan		6-Dokumen/Layanan			
054-Pengelolaan keuangan		3-Dokumen/Layanan		3-Dokumen/Layanan		3-Dokumen/Layanan		3-Dokumen/Layanan			
056-Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan			
057-Pengelolaan kepegawaian		10-Dokumen/Layanan		10-Dokumen/Layanan		10-Dokumen/Layanan		10-Dokumen/Layanan			
058-Pelayanan umum dan perlengkapan		2-Dokumen/Layanan		2-Dokumen/Layanan		2-Dokumen/Layanan		2-Dokumen/Layanan			Pusat
061-Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan		4-Dokumen/Layanan			
<b>002-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis</b>		1-Dokumen/Layanan		1-Dokumen/Layanan		1-Dokumen/Layanan		1-Dokumen/Layanan			
051-Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH			<b>1.629.234</b>		<b>1.200.283</b>		<b>1.200.283</b>		<b>1.200.283</b>		
052-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH		4-Dokumen/Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan	227.455		
053-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH		6-Dokumen/Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan	268.342		
054-Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK		3-Dokumen/Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan	275.656		
055-Dukungan Manajemen Direktorat PDLKWS		4-Dokumen/Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan	191.332		
<i>951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>		10-Dokumen/Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan	237.498		
001-Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat		<i>1-Layanan</i>	<b>7.953.634</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>5.095.155</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>5.855.530</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>11.006.516</b>		
052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1-Layanan	386.100	1-Layanan	386.100	1-Layanan	1.146.475	1-Layanan	1.649.574		
002-Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker BPKH		10-unit		10-unit				1-Layanan			
052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1-Layanan	7.567.534	1-Layanan	4.709.055	1-Layanan	4.709.055	1-Layanan	9.356.942		Pusat/BPKH
053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		9-unit		8-unit		8-unit					
054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	7-unit		6-unit		6-unit						
<i>970-Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>	6-unit		6-unit		6-unit						
Tanpa Sub Out Put	<i>1-Layanan</i>	<b>20.276.657</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>17.826.145</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>17.826.145</b>	<i>1-Layanan</i>	<b>17.509.365</b>		BPKH	
051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran											
052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	22-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen				
	22-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen				



Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNPB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		22-Dokumen		21-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen		
054-Pengelolaan kepegawaian		22-Dokumen		21-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen		
055-Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		22-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen		22-Dokumen		
<b>994-Layanan Perkantoran</b>		<b>1-Layanan</b>	<b>208.516.167</b>		<b>208.516.167</b>		<b>208.516.167</b>	<b>23-Layanan</b>	<b>208.516.167</b>	
<b>001- Layanan Perkantoran Satker Pusat</b>			<b>62.392.095</b>		<b>62.392.095</b>		<b>62.392.095</b>		<b>62.392.095</b>	
001-Gaji dan Tunjangan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan		
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan		PUSAT/BPKH
<b>002- Layanan Perkantoran Satker BPKH</b>			<b>146.124.072</b>		<b>146.124.072</b>		<b>146.124.072</b>		<b>146.124.072</b>	
001-Gaji dan Tunjangan		22-layanan		22-layanan		22-layanan		22-layanan		
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		22-Layanan		22-Layanan		22-Layanan		22-Layanan		
<b>PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN</b>			<b>145.736.857</b>		<b>54.572.454</b>		<b>127.580.921</b>		<b>129.296.709</b>	
<i>Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan</i>									
<b>001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan</b>		<b>5-Juta Hektar</b>	<b>1.744.370</b>	<b>0,5-Juta Hektar</b>	<b>1.007.185</b>	<b>0,5-Juta Hektar</b>	<b>1.007.185</b>	<b>0,5-Juta Hektar</b>	<b>1.007.185</b>	
Tanpa Sub Output										
051-Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah I		2,5 Juta Hektar		0,3 Juta Hektar		0,3 Juta Hektar		0,3 Juta Hektar		
052-Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah II		2,5 Juta Hektar		0,2 Juta Hektar		0,2 Juta Hektar		0,2 Juta Hektar		Pusat
053-Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
054-Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah II		1-laporan		1-laporan		1-laporan		1-laporan		
055-Pengendalian substansi perkembangan pengukuhan kawasan hutan		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		
056-Pelayanan tata batas unit pengelolaan		100-Pemohon		100-Pemohon		100-Pemohon		100-Pemohon		
<b>Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan</b>										
<b>004-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan</b>		<b>1-Judul</b>	<b>270.000</b>	<b>1-Judul</b>	<b>304.070</b>	<b>1-Judul</b>	<b>304.070</b>	<b>1-Judul</b>	<b>304.070</b>	
Tanpa Sub Output										
051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		Pusat
052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga</i>										
<i>007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga</i>		4.778-Km	57.479.479	2.462-Km	24.067.984	6.875-Km	72.435.474	7.140-Km	73.788.872	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua
Tanpa Sub Output										
051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)		4.778-Km		2.462-Km		6.875-Km		7.140-Km		
<i>Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>										
<i>008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>		3-Dokumen	3.080.833	3-Dokumen	1.883.504	3-Dokumen	1.883.504	3-Dokumen	2.245.894	DI Yogyakarta, Bali, Gorontalo
Tanpa Sub Output										
051-Pengendalian pemantapan kawasan hutan		3-BPKH		3-BPKH		3-BPKH		3-BPKH		
<i>Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 02 - Terelesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan</i>									
<i>005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan</i>		48-Pemohon	561.470	40-Pemohon	445.300	44-Pemohon	25.086.277	44-Pemohon	25.086.277	Pusat
Tanpa Sub Output										
051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		48-Pemohon		40-Pemohon		44-Pemohon		44-Pemohon		
052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
054-Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
<i>Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 03 - Terelesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA</i>									
<i>002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA</i>		130000-Hektar	2.077.610	46.500-Hektar	603.470	46.500-Hektar	603.470	46.500-Hektar	603.470	Pusat
Tanpa Sub Output										
051-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA		130000-Hektar		46.500-Hektar		46.500-Hektar		46.500-Hektar		
052-Pemutakhiran data dan peta TORA		26-Provinsi		26-Provinsi		26-Provinsi		26-Provinsi		
053-Sosialisasi Data dan Peta TORA yang muktahir										

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNBP-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>										
<i>006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>		13-Provinsi	80.523.095	20-Dokumen	26.260.941	20-Dokumen	26.260.941	20-Dokumen	26.260.941	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua, Lampung, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo
Tanpa Sub Output										
051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan		13-Provinsi		11-Provinsi		11-Provinsi		11-Provinsi		
052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		1.245-Km		1.888-Km		1.888-Km		1.888-Km		
053-Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH		11-BPKH		11-BPKH		11-BPKH		11-BPKH		
<b>INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>			<b>25.195.310</b>		<b>13.808.803</b>		<b>13.808.803</b>		<b>19.454.262</b>	
<i>Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH</i>									
<i>001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan</i>		11-Dokumen	4.870.508	1-Dokumen	2.662.557	1-Dokumen	2.662.557	1-Dokumen	3.466.891	
Tanpa Sub Out Put										
051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
052-Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
053-Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan		4-Judul		4-Judul		4-Judul		4-Judul		
054-Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		4-Judul		4-Judul		4-Judul		4-Judul		
055-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi			
<i>Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH</i>										
<i>004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH</i>		182-Klaster	13.652.323	126-Klaster	8.260.514	126-Klaster	8.260.514	205-Klaster	13.130.823	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kep. Riau, Di Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua
Tanpa Sub Out Put										
051-Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan		182-Klaster		126-Klaster		126-Klaster		205-Klaster		
052-Manajemen Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan		8-Laporan		6-Laporan		6-Laporan		5-Laporan		

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNPB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH</i>										
<i>005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH</i>		22-Dokumen	6.672.479	18-Dokumen	2.885.732	18-Dokumen	2.885.732	18-Dokumen	2.856.548	
Tanpa Sub Out Put										
051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional		22-Dokumen		18-Dokumen		18-Dokumen		18-Dokumen		
<b>PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>46.063.689</b>		<b>36.028.430</b>		<b>36.028.460</b>		<b>40.276.092</b>	
<i>Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH</i>									
<i>002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP</i>		530-Peta	450.000	530-Peta	335.205	530-Peta	335.235	530-Peta	692.285	
Tanpa Sub Out Put										
051-Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP		530-Peta		530-Peta (Update)		530-Peta		530-Peta		
<i>007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>		1-Laporan	20.100.000	1-Laporan	20.100.000	1-Laporan	20.100.000	1-Laporan	20.100.000	
Tanpa Sub Out Put										
051-Forest Investment Program-Project 2 (FIP)		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
<i>Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 02 - Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030</i>									
<i>004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030</i>		10-Dokumen	2.779.270	11-Dokumen	1.758.806	11-Dokumen	1.758.806	11-Dokumen	2.748.574	
Tanpa Sub Out Put										
051-Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan		2-Dokumen		2-Dokumen		2-Dokumen		2-Dokumen		
052-Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP		3-Dokumen		3-Dokumen		3-Dokumen		3-Dokumen		
053-Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1-Sistem		1-Sistem		1-Sistem		1-Sistem		
054-Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		34-Provinsi		
055-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
056-Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		

Sumatera Utara,  
Sumatera Selatan,  
Lampung, Bangka  
Belitung, Kep. Riau, DI  
Yogyakarta, Bali, NTT,  
Kalimantan Barat,  
Kalimantan Selatan,  
Kalimantan Timur,  
Sulawesi Tengah, Sulawesi  
Selatan, Sulawesi  
Tenggara, Gorontalo,  
Maluku, Papua Barat,  
Papua

Pusat

Pusat

Pusat

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNPB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
057-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
<i>Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan</i>	<i>Sasaran Kegiatan : 03 - Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan</i>									
<i>001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan</i>		1-Dokumen	1.670.000	300-Dokumen	1.090.530	300-Dokumen	1.090.530	300-Dokumen	1.836.994	Pusat
Tanpa Sub Out Put										
051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan		300-Pemohon		300-Pemohon		300-Pemohon		300-Pemohon		
052-Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%			1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen	
<i>Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>										
<i>013-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>		19-Laporan	6.649.172	22-Laporan	5.773.831	22-Laporan	5.773.831	94 - Laporan	7.928.181	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua
Tanpa Sub Out Put										
051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan		19-Laporan		22-Laporan		22-Laporan		94 - Laporan		
<i>Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</i>	<i>Sasaran Kegiatan : 06 - Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</i>									
<i>011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</i>		1-Dokumen	917.950	1-Dokumen	572.860	1-Dokumen	572.860	1-Dokumen	572.860	Pusat, Wilayah Jawa (4 provinsi)
Tanpa Sub Output										
051-Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
<i>Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH</i>	<i>Sasaran Kegiatan : 07 - Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>									
<i>012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH</i>		22-KPH	13.497.297	15-KPH	6.397.198	15-KPH	6.397.198	15-KPH	6.397.198	Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku
Tanpa Sub Output										
051-Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		22-KPH		15-KPH		15-KPH		15-KPH		
052-Manajemen Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		5-Laporan		5-Laporan		5-Laporan		5-Laporan		



Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR</b>			<b>5.717.807</b>		<b>2.726.636</b>		<b>5.726.636</b>		<b>5.987.759</b>	
<i>Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Terlaksananya Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya</i>									
<i>002- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya</i>		<i>30 KLHS</i>	<i>600.000</i>	<i>17 KLHS</i>	<i>336.000</i>	<i>21-KLHS</i>	<i>3.336.000</i>	<i>21-KLHS</i>	<i>3.336.000</i>	<i>Pusat</i>
Tanpa Sub Out Put										
051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30 KLHS		17 KLHS		21-KLHS		21-KLHS			
<i>RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 02 - Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>									
<i>004- RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah</i>		<i>6-Dokumen</i>	<i>2.770.000</i>	<i>1-Dokumen</i>	<i>1.550.636</i>	<i>1-Dokumen</i>	<i>1.550.636</i>	<i>1-Dokumen</i>	<i>1.811.759</i>	<i>Pusat</i>
Tanpa Sub Out Put										
051-Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
052-Penetapan D3TLH Nasional		2-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		1-Dokumen		
053-Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	9-Wilayah Ekoregion		4-Wilayah Ekoregion		4-Wilayah Ekoregion		6-Wilayah Ekoregion			
054-Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia	2-Dokumen		2-Dokumen		2-Dokumen		2-Dokumen			
<i>Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi</i>									
<i>010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air</i>		<i>65-Juta Ha</i>	<i>1.500.000</i>	<i>65-Juta Ha</i>	<i>840.000</i>	<i>65-Juta Ha</i>	<i>840.000</i>	<i>65-Juta Ha</i>	<i>840.000</i>	<i>Pusat</i>
Tanpa Sub Out Put										
051-Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air	65-Juta Ha		65-Juta Ha		65-Juta Ha		65-Juta Ha			
<i>011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH</i>	<i>7-Dokumen</i>	<i>847.807</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Pusat</i>	
Tanpa Sub Out Put										
051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	7-Dokumen		-		-		-			

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN</b>			<b>4.535.000</b>		<b>2.527.249</b>		<b>6.600.649</b>		<b>6.867.946</b>	
<i>Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 01 - Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan</i>									
<b>001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</b>		<b>60-Dokumen</b>	<b>3.785.000</b>	<b>45-Dokumen</b>	<b>2.106.399</b>	<b>49-Dokumen</b>	<b>6.179.799</b>	<b>49-Dokumen</b>	<b>6.447.096</b>	
Tanpa Sub Out Put										
051-Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL		40-Dokumen		35-Dokumen		35-Dokumen		35-Dokumen		
052-Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL ) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan ( IL)		20-Formulir		10-Formulir		10-Formulir		10-Formulir		
053-Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		3-Dokumen		1-NSPK		1-NSPK		1-NSPK		
054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan		240-Instansi		1-Layanan		1-Layanan		1-Layanan		
055-Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan		1-Laporan		1-Sistem		1-Sistem		1-Sistem		
056-Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
057-Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		1-Laporan		
058-Penilaian audit lingkungan hidup		15-Dokumen		9-Dokumen		9-Dokumen		9-Dokumen		
059-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)		12-Dokumen		7-Dokumen		7-Dokumen		7-Dokumen		
060-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan		12-Dokumen		12-Dokumen		12-Dokumen		12-Dokumen		
061-Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah)		68-KPA		46-KPA		46-KPA		46-KPA		
062-Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP	150-Dokumen		161-Dokumen		165-Dokumen		165-Dokumen			
<i>Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi</i>	<i>Sasaran Kegiatan: 03 - Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi</i>									
<b>006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada 5 Provinsi</b>		<b>5-Provinsi</b>	<b>750.000</b>	<b>3-Provinsi</b>	<b>420.850</b>	<b>3-Provinsi</b>	<b>420.850</b>	<b>3-Provinsi</b>	<b>420.850</b>	
Tanpa Sub Out Put										
051-Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5-Provinsi		3-Provinsi		3-Provinsi		3-Provinsi			
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp)</b>			<b>480.427.464</b>		<b>350.007.434</b>		<b>430.089.331</b>		<b>447.060.836</b>	

**Lampiran 3. Perubahan Target Output Kegiatan Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga tahun 2020**

No	SATKER	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga			
		Pagu Awal	(-) Penghematan	(+) ABT Food Estate	(+) ABT PNBPKH
		km	km	km	km
1	BPKH Wilayah I Medan	96	47	403	403
2	BPKH Wilayah III Palembang	246	15	315	315
3	BPKH Wilayah III Pontianak	-	-	-	-
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	97	-	-	-
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	350	110	110	375
6	BPKH Wilayah VI Manado	84	84	84	84
7	BPKH Wilayah VII Makassar	-	-	-	-
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	-	-	-	-
9	BPKH Wilayah IX Ambon	71	67	67	67
10	BPKH Wilayah X Jayapura	429	429	3.309	3.309
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	-	-	-	-
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	200	80	80	80
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	280	2	2	2
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	247	61	61	61
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo		8	8	8
16	BPKH Wilayah XVI Palu	870	430	430	430
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	-	-	-	-
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	230	25	25	25
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	200	200	200	200
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	135	17	17	17
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	1.449	554	1.430	1.430
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	333	333	333	333
		<b>5.317</b>	<b>2.462</b>	<b>6.874</b>	<b>7.140</b>

**Lampiran 4. Perubahan Target Output Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH tahun 2020**

No	SATKER	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH			
		Pagu Awal	(-) Penghematan	(+) ABT Food Estate	(+) ABT PNBP-PKH
		Klaster	Klaster	Klaster	Klaster
1	BPKH Wilayah I Medan	7	4	4	4
2	BPKH Wilayah III Palembang	7	4	4	4
3	BPKH Wilayah III Pontianak	10	5	5	15
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	10	10	10	10
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	6	3	3	6
6	BPKH Wilayah VI Manado	7	5	5	9
7	BPKH Wilayah VII Makassar	8	8	8	16
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	10	7	7	10
9	BPKH Wilayah IX Ambon	6	2	2	6
10	BPKH Wilayah X Jayapura	6	6	6	6
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	13	11	11	14
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	7	6	6	6
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	10	5	5	10
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	10	5	5	10
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	6	6	6	7
16	BPKH Wilayah XVI Palu	10	10	10	20
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	10	6	6	10
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	4	4	4	9
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	8	-	-	-
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	7	4	4	4
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	10	5	9	9
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	20	10	10	20
		<b>192</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>205</b>

**Lampiran 5. Perubahan Target Output Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH tahun 2020**

No	SATKER	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH			
		Pagu Awal	(-) Penghematan	(+) ABT Food Estate	(+) ABT PNBP-PKH
		KPH	KPH	KPH	KPH
1	BPKH Wilayah I Medan	-	-	-	-
2	BPKH Wilayah III Palembang	2	2	2	2
3	BPKH Wilayah III Pontianak	5	3	3	3
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	3	1	1	1
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	-	-	-	-
6	BPKH Wilayah VI Manado	3	2	2	2
7	BPKH Wilayah VII Makassar	-	-	-	-
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	-	-	-	-
9	BPKH Wilayah IX Ambon	4	2	2	2
10	BPKH Wilayah X Jayapura	-	-	-	-
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	-	-	-	-
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	-	-	-	-
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	-	-	-	-
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	-	-	-	-
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	-	-	-	-
16	BPKH Wilayah XVI Palu	1	1	1	1
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	-	-	-	-
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	-	-	-	-
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	4	4	4	4
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	-	-	-	-
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	-	-	-	-
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	-	-	-	-
		22	15	15	15



**Lampiran 6. Perubahan Target Output Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH tahun 2020**

No	SATKER	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH			
		Pagu Awal	(-) Penghematan	(+) ABT Food Estate	(+) ABT PNBP-PKH
		Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi
1	BPKH Wilayah I Medan	8	1	1	1
2	BPKH Wilayah III Palembang	11	1	1	1
3	BPKH Wilayah III Pontianak	4	1	1	7
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	13	1	1	21
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	14	1	1	28
6	BPKH Wilayah VI Manado	8	1	1	10
7	BPKH Wilayah VII Makassar	3	3	3	8
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	2	1	1	1
9	BPKH Wilayah IX Ambon	-	-	-	-
10	BPKH Wilayah X Jayapura	2	1	1	1
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	-	-	-	-
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	1	-	-	-
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	6	1	1	1
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	2	2	2	2
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	1	-	-	1
16	BPKH Wilayah XVI Palu	3	3	3	5
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	-	-	-	-
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	1	-	-	-
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	2	2	2	4
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	3	1	1	1
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	11	1	1	1
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	10	1	1	1
		105	22	22	94



Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telp. 021-5730289 | Email: [paplanologi@gmail.com](mailto:paplanologi@gmail.com)